

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I
TAHUN 2020**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2020 dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pengawasan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, dengan maksud untuk melihat sejauh mana hasil kerja yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, sehingga fungsi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI diharapkan dapat memberikan nuansa perubahan untuk dapat mewujudkan kepercayaan publik pada Badan Peradilan.

Tujuan dilaksanakannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran dan informasi secara keseluruhan tentang keberhasilan dan capaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan selama tahun 2020 dan memberikan dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja dilingkungan Badan Pengawasan. Oleh karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini semoga komitmen dan loyalitas kita dapat lebih ditingkatkan pada waktu yang akan datang.

Harapan kami, adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang peduli dalam usaha-usaha perbaikan sistem pengawasan, peningkatan implementasi pengawasan dan internalisasi nilai-nilai pengawasan sehingga berdampak pada terwujudnya budaya pengawasan dilingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Jakarta, 24 Februari 2021

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



DWIARSO BUDI SANTIARTO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengawasan sebagai Pengawas Internal diberikan tugas untuk melakukan seluruh proses kegiatan yang meliputi audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan sehingga kinerja yang diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal serta berupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana pengawasan dan peningkatan sarana yang berkaitan dengan pedoman pelaksana tugas pengawasan serta adanya akses kemudahan Sistem Informasi Pengawasan dalam penyampaian Lapoan / Pengaduan.

Bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan efektifitas tugas tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. Sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI diharapkan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Sejalan hal tersebut diatas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2020, jumlah aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 170 orang yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 71 orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 83 orang dan tenaga honorer berjumlah 16 orang dengan komposisi jabatan sebagai Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan PPNPN dengan rincian sebagai berikut :

A. Pejabat Struktural :

- Pejabat Eselon I : 1 orang
- Pejabat Eselon II : 4 orang (Sekretaris dan 3 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 3 orang
- Pejabat Eselon IV : 13 orang

B. Pejabat Fungsional

- Hakim Tinggi : 46 orang
- Hakim Yustisial : 25 orang
- Auditor : 29 orang
- Auditor Kepegawaian : 10 orang
- Pustakawan : 2 orang

| | |
|----------------------|------------|
| ▪ Analis Kepegawaian | : - |
| ▪ Pranata Komputer | : 2 orang |
| ▪ Arsiparis | : 1 orang |
| C. Fungsional Umum | : 18 orang |
| D. PPNPN | : 16 orang |

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2020 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.569 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 2.259 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi / stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 286 pengaduan, Pengaduan Aplikasi Siwas sejumlah 1.023 pengaduan dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 1 pengaduan.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, Tahun 2020 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 162 aparat peradilan.

4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 1 (satu) orang Hakim. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Agama Mks.

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatannya yaitu diantaranya Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu RKA K/L, Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ, *Liaison Officer* (LO), Reviu Revaluasi BMN dan Probit Audit.

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 25 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 25 satker.

Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker.

Audit Dengan Tujuan Tertentu Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat dan Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Perwakilan melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu bersama atas penanganan perkara pada Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung terhadap beberapa Satuan Kerja yaitu:

Tabel Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu Bersama KPK dan BPKP

| No | Satuan Kerja | No | Satuan Kerja |
|-----|-------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1. | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 2. | Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh |
| 3. | Pengadilan Negeri Denpasar | 4. | Pengadilan Negeri Tabanan |
| 5. | Pengadilan Negeri Praya | 6. | Pengadilan Negeri Mataram |
| 7. | PTUN Kupang | 8. | Pengadilan Militer III-15 Kupang |
| 9. | Pengadilan Negeri Ambon | 10. | PTUN Ambon |
| 11. | PTUN Jayapura | 12. | Pengadilan Agama Jayapura |
| 13. | Pengadilan Negeri Manokwari | 14. | Pengadilan Agama Manokwari |
| 15. | Pengadilan Negeri Ternate | 16. | Pengadilan Agama Ternate |
| 17. | Pengadilan Agama Medan | 18. | Pengadilan Negeri Binjai |
| 19. | Pengadilan Negeri Padang | 20. | Pengadilan Agama Padang |
| 21. | PTUN Pekanbaru | 22. | Pengadilan Agama Pekanbaru |
| 23. | Pengadilan Agama Jambi | 24. | PTUN Jambi |
| 25. | Pengadilan Negeri Bengkulu | 26. | Pengadilan Agama Bengkulu |
| 27. | Pengadilan Negeri Palembang | 28. | PTUN Palembang |
| 29. | Pengadilan Negeri Tanjung Karang | 30. | Pengadilan Agama Tanjung Karang |
| 31. | Pengadilan Militer II-08 Jakarta | 32. | Pengadilan Agama Jakarta Selatan |
| 33. | PTUN Bandung | 34. | Pengadilan Negeri Bandung |
| 35. | Pengadilan Agama Semarang | 36. | Pengadilan Militer II-10 Semarang |
| 37. | Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta | 38. | Pengadilan Negeri Bantul |
| 39. | Pengadilan Negeri Sidoarjo | 40. | Pengadilan Militer III-12 Surabaya |
| 41. | Pengadilan Negeri Batam | 42. | Pengadilan Agama Batam |
| 43. | Pengadilan Negeri Pangkalpinang | 44. | PTUN Pangkalpinang |
| 45. | PTUN Serang | 46. | Pengadilan Negeri Rangkasbitung |
| 47. | PTUN Pontianak | 48. | Pengadilan Negeri Pontianak |

| | | | |
|-----|------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 49. | Pengadilan Negeri Palangkaraya | 50. | Pengadilan Agama Palangkaraya |
| 51. | Pengadilan Agama Banjarbaru | 52. | PTUN Banjarmasin |
| 53. | Pengadilan Agama Samarinda | 54. | PTUN Samarinda |
| 55. | Pengadilan Negeri Manado | 56. | PTUN Manado |
| 57. | Pengadilan Negeri Palu | 58. | PTUN Palu |
| 59. | Pengadilan Negeri Kendari | 60. | PTUN Kendari |
| 61. | Pengadilan Militer III-16 Makassar | 62. | Pengadilan Agama Makassar |
| 63. | Pengadilan Negeri Gorontalo | 64. | Pengadilan Agama Gorontalo |
| 65. | Pengadilan Negeri Mamuju | 66. | Pengadilan Agama Mamuju |
| 67. | Pengadilan Negeri Tarakan | 68. | Pengadilan Agama Tarakan |

Maksud dan Tujuan dilakukan pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu bersama:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar.

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:

1. Penanganan Perkara Perdata.
2. Penanganan Perkara Pidana.
3. Penanganan Perkara TUN.
4. Pengadilan Pajak.

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (Pelaksanaan Tahun 2019) terdapat 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai A, 52 Satker (70,27%) memperoleh nilai BB, 14 Satker (18,91%) memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai CC.

Capaian nilai SAKIP tahun 2019 (Pelaksanaan Tahun 2020) terhadap 9 satker (12,16%) memperoleh nilai A, 57 Satker (77,02%) memperoleh nilai BB, 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C.

8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2020 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 57 (lima puluh tujuh) Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 32 satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 24 satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 0 satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 1 satker.

9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2020 yang terdiri dari 569 temuan dengan 1.220 rekomendasi sebesar Rp 35.922.673.759,06 dengan status sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.083 rekomendasi sebesar Rp 29.796.510.494,85.
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 122 rekomendasi sebesar Rp 5.602.934.444,58.
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp 523.228.819,63.

10. Penguatan Sistem Pengawasan

Pada tahun 2020 penguatan sistem pengawasan dilakukan *Consulting* dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 12 sd. 14 Februari 2020. Maksud dan Tujuan kegiatan *Consulting* tersebut :

- 1) Memberikan pemahaman teori dan praktek pengadaan belanja modal gedung dan bangunan dari sisi kebijakan, resiko dan aspek pengendalian yang wajib dipersiapkan peserta dari satuan kerja.
- 2) Memberikan sarana knowledge managemen yang berkelanjutan, mengurangi hal tak terduga yang kurang menyenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui penerapan manajemen risiko.
- 3) Menginisiasi keberanian dari masing-masing satuan kerja untuk memulai transparan, akuntabel dan berintegritas sejak awal proses pengadaan untuk menghindari resiko pengadaan gagal selesai pada tahun anggaran berjalan maupun resiko tindak pidana.

Peserta kegiatan *consulting* terdiri dari Ketua Pengadilan, Pejabat Pembuat Komitmen dari Pengadilan Baru yang memiliki proyek belanja modal gedung dan bangunan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Ikhtisar Eksekutif..... | ii |
| Daftar Isi..... | vii |
| I. Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 18 |
| C. Sistematika Penyajian | 22 |
| II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | 23 |
| A. Rencana Strategis 2020 - 2024 | 23 |
| 1. Visi dan Misi | 23 |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis | 23 |
| B. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 24 |
| C. Rencana Kinerja Tahun 2020 | 26 |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 27 |
| E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan | 33 |
| III. Akuntabilitas Kinerja | 35 |
| A. Pengukuran Kinerja | 35 |
| B. Analisis Akuntabilitas Kinerja | 36 |
| C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja | 45 |
| IV. Penutup..... | 47 |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran | 47 |

Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matrik Rencana Strategis 2020 - 2024
4. SK Kepala Badan Pengawasan tentang Tim LKjIP
5. Rencana Kinerja Tahun 2019, 2020
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan satuan kerja pengawas fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dan sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kemanfaatan dan penyelenggaraan lebih baik. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2020, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 170 orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan PPNPN. Jumlah aparatur pada Badan Pengawasan yang berjumlah 170 orang terdiri dari tenaga teknis yudisial 71 orang, tenaga non teknis yudisial 83 orang dan tenaga honorer 16 orang.

Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 telah mengadakan peningkatan SDM dengan cara mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Fungsional Umum untuk mengikuti Diklat dan Bimtek sebanyak 15 Diklat dan Bimtek.

Pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dapat diperinci sebagai berikut:

| NO | NAMA DIKLAT, BIMTEK DAN SOSIALISASI | JUMLAH PESERTA | PENYELENGGARA | TUJUAN |
|----|---|----------------|---|----------------------------------|
| 1. | Pendidikan Diktupa TNI AD | 1 Orang | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 2. | Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mahkamah Agung RI | 11 Orang | Badan Litbang Kumdil MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 3. | Sosialisasi Implementasi Aplikasi SAKTI | 3 Orang | Badan Urusan Administrasi | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 4. | Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inpassing Angkatan II Tahun 2020 | 1 Orang | Perpustakaan Nasional | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 5. | Pendidikan dan Pelatihan Sertifikat Hakim Mediator Bagi Hakim Peradilan Umum | 2 Orang | Badan Pengawasan MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 6. | Pelatihan Sertifikat Hakim, Juru Bicara Pengadilan dan Pelatihan <i>English Effective Presentation</i> | 2 Orang | Badan Litbang Diklat Kumdil MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 7. | Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Anak (SPPA) | 2 Orang | Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 8. | Pelatihan <i>Online Design Thinking For Innovation</i> (Desain Berpikir Untuk Inovasi) | 1 Orang | Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |

| | | | | |
|-----|---|---------|--|----------------------------------|
| 9. | Pelatihan (<i>Online English Presentation</i>) | 3 Orang | Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 10. | Pelatihan (<i>Online Practical Problem Solving</i>) Pemecahan Masalah Praktis | 1 Orang | Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 11. | Diklat Penjejaran Auditor Madya secara <i>E-Learning</i> | 2 Orang | BPKP | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 12. | Pemanggilan Peserta TOT (<i>Training of Trainer</i>) | 1 Orang | Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 13. | Pelatihan <i>Online English Effective Presentation</i> gelombang III Tahap I Kelas 19 s.d 36 Tahun 2020 | 3 Orang | Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 14. | Pelatihan <i>Online Leader as a Coach Batch 4</i> Tahun 2020 | 1 Orang | Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MARI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 15. | Pelatihan Sertifikasi Niaga Hakim BAGI Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia. | 2 Orang | Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI | Peningkatan Kompetensi SDM |

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2020 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.569 pengaduan, dengan rincian :

A. Penanganan Pengaduan

- 1) Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan, sejumlah 2.259 pengaduan
- 2) Pengaduan dari Instansi / Stakeholder Mahkamah Agung RI, sejumlah 286 Pengaduan
- 3) Pengaduan dari Aplikasi SIWAS sejumlah 1.023 Pengaduan
- 4) Pengaduan dari SATGAS sejumlah 1 Pengaduan

B. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

- 1) Pengaduan masih proses penyelesaian sejumlah 1.432 Pengaduan
- 2) Pengaduan yang selesai diproses sejumlah 2.137 Pengaduan
 - Diperiksa Tim Bawas sejumlah 131 Pengaduan
 - Delegasi ke Tingkat Banding sejumlah 1 Pengaduan
 - Konfirmasi sejumlah 62 Pengaduan
 - Klarifikasi sejumlah 685 Pengaduan
 - Memorandum / Delegasi Internal sejumlah 20 Pengaduan
 - Dijawab Surat sejumlah 853 Pengaduan
 - Diarsipkan sejumlah 17 Pengaduan
 - Gabung Berkas sejumlah 349 Pengaduan
 - Dicabut sejumlah 19 Pengaduan

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna membuktikan kebenaran informasinya.
- c. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakukan pemeriksaan.
- d. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan.
- b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak fair), yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud.
- c. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi lain.
- d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.
- e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan.
- f. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.
- g. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya.
- h. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).
- i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada Pelapor, dalam hal:

- a. Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukan melalui mekanisme upaya hukum;
- b. Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar disampaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- c. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. Tahun 2020 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 162 aparat peradilan, yaitu:

- a) Hakim, sejumlah 90 orang
- b) Hakim Ad Hoc, sejumlah 7 orang
- c) Panitera, sejumlah 4 orang
- d) Sekretaris, sejumlah 5 orang
- e) Panitera Muda, sejumlah 6 orang
- f) Panitera Pengganti, sejumlah 20 orang
- g)Jurusita, sejumlah 8 orang
- h)Jurusita Pengganti, sejumlah 5 orang
- i) Pejabat Struktural, sejumlah 4 orang
- j) Staf, sejumlah 11 orang
- k)PPNPN, sejumlah 2 orang

4. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 1 orang Hakim, pada Pengadilan Agama Pct (dahulu Wakil Ketua Pengadilan Agama TI) jenis hukuman yang dijatuhkan sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Agama Mks.

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

| No | Kegiatan | Resume Hasil Pemeriksaan |
|----|---|---|
| 1 | Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2020. Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Laporan Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2020. Menindaklanjuti hasil Reviu PIPK, sesuai Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 6/WKMA.NY/SK/IX/2020 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, Tim Auditor Badan Pengawasan diperankan sebagai Pengendali Teknis dalam kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk lebih memperkuat Tim Penilai PIPK MA RI dalam melaksanakan penilaian Penerapan PIPK di lingkungan MA RI. |
| 2 | Reviu RKA K/L | Pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2020 dengan catatan sebagai berikut: - Masih terdapat pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang kurang tepat tidak sesuai ketentuan (tidak teralokasi dan atau salah pengalokasian). - Masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM, pengelompokan penganggaran atas kegiatan yang kurang tepat. - Alokasi pemeliharaan gedung dan kendaraan belum sepenuhnya mengacu pada standar biaya, dan volume output riil aset (BMN) existing sebagai |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| | | <p><i>basis data pengusulan alokasi.</i></p> <p>Pengajuan alokasi belanja modal belum sepenuhnya didukung dan dilampirkan dengan data dukung sesuai ketentuan dan terdapat sejumlah kegiatan pembangunan gedung kantor satker baru tidak dapat direviu karena data dukung tidak diperoleh.</p> |
| 3 | Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ | <p>Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dari 98,87 % dari rencana penyerapannya, yakni dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Pegawai mencapai 94,85% senilai Rp.1.981.642.607.005</p> <p>b. Belanja Barang mencapai 96,74% senilai Rp.656.202.890.367</p> <p>c. Belanja Modal mencapai 97,68% senilai Rp.317.979.226.236</p> <p>Terdapat dua Satuan Kerja yang tidak menandatangani kontrak :</p> <p>a. Pengadilan Negeri Manokwari dikarenakan anggaran ditarik oleh pusat (Biro keuangan) sehingga tidak dapat dilaksanakan;</p> <p>b. Pengadilan Negeri Nanga Bulik, terdapat permasalahan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi sehingga untuk pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi pengawasan tidak dapat dilakukan penandatanganan kontrak. Namun untuk konsultasi perencanaan sudah terealisasi sebesar 85%.</p> <p>Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang dikembangkan BPKP maka nilai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mencapai 85,80 yakni Perdiklat Kualitas Belanja Baik.</p> |
| 4 | <i>Liaison Officer (LO)</i> | <p>Sampai dengan semester pertama tahun 2020 diperoleh informasi melalui <i>entry meeting</i> Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2019, menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku Penanggungjawab pemeriksaan maka diperlukan <i>Liaison Officer</i> untuk menjembatani tim pemeriksa BPK dengan <i>auditee</i> yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif. Untuk itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditunjuk sebagai <i>Liaison Officer</i> pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh tim pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya untuk Mahkamah Agung RI</p> |
| 5 | Reviu Revaluasi BMN | <p>Meskipun pada tahun 2020 ini Badan Pengawasan MA RI tidak memiliki target kinerja Reviu Revaluasi BMN, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan revaluasi BMN untuk memenuhi amanat PMK Nomor 107 Tahun 2019 yang telah dilaksanakan bersamaan dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi.</p> <p>Secara umum hasil pelaksanaan reviu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu atas Penyediaan Data Awal (Persiapan Inventarisasi BMN) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Reviu atas Pelaksanaan Inventarisasi BMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 6 | Probit Audit | <p>Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa.</p> <p>Probit Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku.</p> <p>Tahun 2020, probity audit dilaksanakan pada 24 (dua puluh empat) satuan kerja</p> |

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

A. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan Pemeriksaan Reguler pada 52 (lima puluh dua) satker. Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,

II, III, IV berjumlah 25 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 25 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker.

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manajemen Peradilan, temuannya sejumlah 88 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan,
2. Administrasi Perkara, temuannya sejumlah 148 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll.
3. Administrasi Persidangan, temuannya sejumlah 139 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang, dll.
4. Administrasi Umum, temuannya sejumlah 299 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Kedisiplinan, Laporan Kinerja, Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas Pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebabkan adanya Indikasi kemahalan harga, dll.
5. Kinerja Pelayanan Publik, temuannya sejumlah 97 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum), dll.

B. Audit Dengan Tujuan Tertentu Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat dan Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Perwakilan melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu bersama atas penanganan perkara pada Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung terhadap 68 Satuan Kerja, yaitu pada Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 27 satker. Lingkungan Peradilan Agama berjumlah 20 satker. Lingkungan Peradilan Militer berjumlah 6 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN berjumlah 15 satker.

Maksud dan Tujuan dilakukan pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu bersama:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar.

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:

1. Penanganan Perkara Perdata.
2. Penanganan Perkara Pidana.
3. Penanganan Perkara TUN.
4. Pengadilan Pajak

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker Eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) Satker dengan maksud untuk :

- a. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
- b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
- c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel 1.4.1 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah I

| No | Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2019 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2020) | | | | | |
|---------------|--|----------|----|-----|--------|--------------|
| | Nilai | Kategori | PT | PTA | PT TUN | DILMIL TI |
| 1 | >90 – 100 | AA | - | - | - | - |
| 2 | >80 – 90 | A | 1 | 1 | - | - |
| 3 | >70 – 80 | BB | 7 | 8 | - | 1 |
| 4 | >60 – 70 | B | 1 | - | - | - |
| 5 | >50 – 60 | CC | - | - | - | - |
| 6 | >30 – 50 | C | - | - | 1 | - |
| 7 | 0 – 30 | D | - | - | - | - |
| Jumlah | | | 9 | 9 | 1 | 1 |

Tabel 1.4.2 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah II

| No Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2019 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2020) | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----|-----|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Nilai | Kategori | PT | PTA | PT TUN | DILMIL TI | DILMIL TAMA | ESELON I |
| 1 | >90 – 100 | AA | - | - | - | - | - | - |
| 2 | >80 – 90 | A | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | >70 – 80 | BB | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 6 |
| 4 | >60 – 70 | B | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | >50 – 60 | CC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | >30 – 50 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 – 30 | D | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 |

Tabel 1.4.3 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah III

| No Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2019 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2020) | | | | | | |
|---|-----------|----------|----|-----|--------|--------------|
| | Nilai | Kategori | PT | PTA | PT TUN | DILMIL TI |
| 1 | >90 – 100 | AA | - | - | - | - |
| 2 | >80 – 90 | A | - | - | - | - |
| 3 | >70 – 80 | BB | 7 | 9 | 1 | - |
| 4 | >60 – 70 | B | 2 | - | - | - |
| 5 | >50 – 60 | CC | 1 | - | - | - |
| 6 | >30 – 50 | C | - | - | - | - |
| 7 | 0 – 30 | D | - | - | - | - |
| Jumlah | | | 10 | 9 | 1 | 0 |

Tabel 1.4.4 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah IV

| No Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2019 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2020) | | | | | | |
|---|-----------|----------|----|-----|--------|--------------|
| | Nilai | Kategori | PT | PTA | PT TUN | DILMIL TI |
| 1 | >90 – 100 | AA | - | - | - | - |
| 2 | >80 – 90 | A | 2 | 3 | - | - |
| 3 | >70 – 80 | BB | 3 | 1 | - | - |
| 4 | >60 – 70 | B | - | 1 | - | - |
| 5 | >50 – 60 | CC | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---------------|----------|---|---|---|---|---|
| 6 | >30 – 50 | C | - | - | - | - |
| 7 | 0 – 30 | D | - | - | - | - |
| Jumlah | | | 5 | 5 | 0 | 0 |

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (pelaksanaan Tahun 2019) terdapat 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai A, 52 Satker (70,27%) memperoleh nilai BB, 14 Satker (18,91%) memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai CC (sangat cukup).

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2019 (pelaksanaan Tahun 2020) terdapat 9 Satker (12,16%) memperoleh nilai A, 57 Satker (77,02%) memperoleh nilai BB, 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai B, 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C (cukup).

Capaian nilai SAKIP tahun 2019 (pelaksanaan tahun 2020) terhadap 74 satuan kerja Eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 9 Satker (12,16%), dan BB (sangat baik) 57 Satker (77,02%) namun untuk kategori B (baik) terdapat penurunan dari 14 Satker (18,91%) menjadi 7 Satker (9,45%) dan untuk tahun 2018 (pelaksanaan tahun 2019) yang masuk kategori CC (sangat cukup) 1 Satker (1,35%) dan untuk tahun 2019 (pelaksanaan tahun 2020) untuk kategori C (cukup) 1 Satker (1,35%). Hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

Tabel 1.4.5 Nilai Evaluasi LKjIP Tahun 2019 Satker Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2020)

| NO. | NAMA SATKER | PERENCANAAN KINERJA | PENGUKURAN KINERJA | PELAPORAN KINERJA | EVALUASI INTERNAL | PENCAPAIAN KINERJA | SKOR | KATEGORI |
|-----|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|----------|
| | | BOBOT 30% | BOBOT 25% | BOBOT 15% | BOBOT 10% | BOBOT 20% | | |
| 1 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | 25,02 | 18,48 | 12,23 | 7,75 | 15,00 | 78,48 | BB |
| 2 | KEPANITERAAN | 24,11 | 19,72 | 13,41 | 6,38 | 15,00 | 78,61 | BB |
| 3 | DITJEN. BADILUM | 22,06 | 18,99 | 11,44 | 7,50 | 15,63 | 75,61 | BB |
| 4 | DITJEN. BADILAG | 25,02 | 20,00 | 12,54 | 7,75 | 15,00 | 80,30 | A |
| 5 | DITJEN. BADIMILTUN | 23,44 | 19,25 | 10,88 | 5,50 | 11,04 | 70,11 | BB |
| 6 | BADAN PENGAWASAN | 22,56 | 20,00 | 12,80 | 7,75 | 16,25 | 79,36 | BB |
| 7 | BALITBANG DIKLAT KUMDIL | 25,55 | 19,38 | 12,80 | 5,50 | 11,67 | 74,89 | BB |
| 8 | PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH | 24,05 | 18,48 | 12,61 | 7,96 | 14,38 | 77,48 | BB |
| 9 | MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH | 23,43 | 18,74 | 11,11 | 7 | 11,25 | 71,53 | BB |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|----|
| 10 | PENGADILAN TINGGI MEDAN | 21,87 | 18,63 | 10,64 | 7,33 | 10,63 | 69,1 | B |
| 11 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN | 24,76 | 19,9 | 12,61 | 7,88 | 11,88 | 77,03 | BB |
| 12 | PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN | 24,16 | 20,27 | 12,89 | 7 | 15,63 | 79,95 | BB |
| 13 | PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN | 0 | 9,06 | 12,14 | 7,96 | 11,67 | 40,83 | C |
| 14 | PENGADILAN TINGGI PEKANBARU | 26,12 | 20,64 | 13,17 | 8,5 | 11,88 | 80,31 | A |
| 15 | PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU | 24,05 | 18,48 | 12,61 | 8,08 | 15,63 | 78,85 | BB |
| 16 | PENGADILAN TINGGI PADANG | 22,72 | 19,75 | 11,3 | 6,75 | 13,33 | 73,85 | BB |
| 17 | PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG | 25,75 | 19,38 | 12,05 | 7,88 | 11,88 | 76,94 | BB |
| 18 | PENGADILAN TINGGI BENGKULU | 24,41 | 18,22 | 12,61 | 8,08 | 15 | 78,32 | BB |
| 19 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU | 23,99 | 18,75 | 12,94 | 7,63 | 16,67 | 79,98 | BB |
| 20 | PENGADILAN TINGGI JAMBI | 23,06 | 20,79 | 12,05 | 7,21 | 13,33 | 76,44 | BB |
| 21 | PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI | 25,07 | 19,9 | 12,09 | 7,54 | 16,67 | 81,27 | A |
| 22 | PENGADILAN TINGGI PALEMBANG | 24,16 | 20,27 | 12,47 | 7,96 | 13,96 | 78,82 | BB |
| 23 | PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG | 24,73 | 20,16 | 12,47 | 7 | 11,88 | 76,24 | BB |
| 24 | PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG | 22,71 | 18,73 | 12,14 | 6,58 | 10,03 | 70,19 | BB |
| 25 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG | 23,99 | 18,75 | 12,94 | 7,63 | 16,67 | 79,98 | BB |
| 26 | PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG | 24,2 | 18,48 | 12,61 | 7,96 | 15,63 | 78,88 | BB |
| 27 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG | 23,54 | 20,16 | 10,92 | 5,96 | 14,38 | 74,96 | BB |
| 28 | PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA | 24,75 | 19,63 | 13,41 | 7,13 | 15,00 | 79,90 | BB |
| 29 | PENGADILAN TINGGI AGAMA | 25,05 | 19,90 | 12,38 | 6,92 | 15,63 | 79,86 | BB |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|----|
| | DKI JAKARTA | | | | | | | |
| 30 | PENGADILAN MILITER UTAMA | 22,88 | 18,36 | 10,88 | 5,50 | 15,00 | 72,61 | BB |
| 31 | PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA | 21,84 | 18,07 | 11,95 | 7,71 | 15,00 | 74,57 | BB |
| 32 | PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA | 23,25 | 17,61 | 9,47 | 6,58 | 11,25 | 68,17 | B |
| 33 | PENGADILAN TINGGI BANDUNG | 24,57 | 19,63 | 11,16 | 7,50 | 13,75 | 76,60 | BB |
| 34 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG | 25,09 | 18,06 | 12,23 | 8,63 | 13,33 | 77,34 | BB |
| 35 | PENGADILAN TINGGI BANTEN | 22,75 | 19,00 | 11,91 | 6,71 | 15,63 | 75,99 | BB |
| 36 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN | 23,75 | 19,38 | 12,23 | 7,67 | 11,67 | 74,70 | BB |
| 37 | PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH | 20,50 | 16,51 | 12,23 | 7,75 | 16,67 | 73,66 | BB |
| 38 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG | 19,70 | 15,01 | 11,16 | 5,50 | 11,67 | 63,03 | B |
| 39 | PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA | 25,58 | 19,26 | 11,67 | 7,38 | 14,38 | 78,26 | BB |
| 40 | PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA | 25,25 | 19,74 | 12,94 | 8,08 | 16,67 | 82,67 | A |
| 41 | PENGADILAN TINGGI SURABAYA | 20,27 | 15,42 | 12,00 | 6,13 | 10,00 | 63,81 | B |
| 42 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA | 24,73 | 19,00 | 12,23 | 7,88 | 15,00 | 78,84 | BB |
| 43 | PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA | 23,95 | 18,63 | 11,44 | 7,17 | 15,00 | 76,18 | BB |
| 44 | PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA | 20,78 | 14,64 | 11,16 | 5,50 | 13,33 | 65,40 | B |
| 45 | PENGADILAN TINGGI DENPASAR | 23,47 | 18,63 | 11,95 | 7,33 | 13,96 | 75,34 | BB |
| 46 | PENGADILAN TINGGI PONTIANAK | 22,74 | 19,38 | 10,69 | 7,00 | 13,33 | 74,30 | BB |
| 47 | PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK | 23,79 | 19,38 | 11,67 | 7,21 | 15,63 | 77,67 | BB |
| 48 | PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR | 22,47 | 14,01 | 11,67 | 7,13 | 15,00 | 70,27 | BB |
| 49 | PENGADILAN | 22,45 | 15,65 | 11,67 | 7,00 | 15,00 | 71,77 | BB |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|----|
| | TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR | | | | | | | |
| 50 | PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN | 22,17 | 17,85 | 12,54 | 7,54 | 12,29 | 72,11 | BB |
| 51 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN | 21,35 | 17,89 | 12,00 | 7,75 | 11,25 | 70,24 | BB |
| 52 | PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA | 22,97 | 17,7 | 10,17 | 7,00 | 13,33 | 71,17 | BB |
| 53 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH | 22,21 | 16,43 | 11,11 | 7,00 | 13,33 | 70,08 | BB |
| 54 | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | 23,74 | 19,38 | 12,47 | 7,33 | 15,00 | 77,91 | BB |
| 55 | PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO | 24,53 | 19,75 | 11,11 | 7,00 | 13,33 | 75,72 | BB |
| 56 | PENGADILAN TINGGI MANADO | 21,65 | 15,68 | 9,47 | 5,83 | 11,67 | 64,29 | B |
| 57 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO | 24,08 | 19,36 | 12,23 | 6,38 | 16,25 | 78,30 | BB |
| 58 | PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH | 21,18 | 16,69 | 12,23 | 7,13 | 13,33 | 70,56 | BB |
| 59 | PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU | 23,06 | 19,64 | 11,67 | 7,00 | 13,96 | 75,33 | BB |
| 60 | PENGADILAN TINGGI KENDARI | 20,33 | 18,64 | 11,44 | 7,42 | 12,29 | 71,61 | BB |
| 61 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI | 20,33 | 18,64 | 11,44 | 7,42 | 12,29 | 71,78 | BB |
| 62 | PENGADILAN TINGGI MAKASSAR | 18,71 | 13,75 | 9,19 | 6,13 | 12,29 | 60,06 | B |
| 63 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR | 21,44 | 19,00 | 12,23 | 7,75 | 15,63 | 76,05 | BB |
| 64 | PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR | 20,59 | 19,38 | 12,00 | 7,00 | 11,67 | 70,63 | BB |
| 65 | PENGADILAN TINGGI MATARAM | 24,88 | 20,16 | 12,28 | 7,75 | 15,21 | 80,28 | A |
| 66 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM | 24,04 | 20,16 | 13,13 | 7,75 | 15,00 | 80,08 | A |
| 67 | PENGADILAN TINGGI KUPANG | 21,15 | 17,85 | 11,77 | 8,04 | 13,33 | 72,14 | BB |
| 68 | PENGADILAN TINGGI AGAMA | 25,98 | 20,42 | 12,56 | 7,33 | 18,33 | 84,62 | A |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | NUSA TENGARA TIMUR | | | | | | | |
| 69 | PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA | 21,29 | 18,89 | 11,58 | 7,00 | 14,5 | 73,26 | BB |
| 70 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA | 24,12 | 19,52 | 12,47 | 7,4 | 18,33 | 81,84 | A |
| 71 | PENGADILAN TINGGI AMBON | 25,05 | 19,78 | 12,56 | 8,38 | 16,25 | 82,02 | A |
| 72 | PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON | 21,9 | 19 | 10,64 | 7,21 | 12,29 | 71,04 | BB |
| 73 | PENGADILAN TINGGI JAYAPURA | 24,01 | 19 | 11,77 | 7,71 | 13,33 | 75,82 | BB |
| 74 | PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA | 23,7 | 17,02 | 11,16 | 7,33 | 13,33 | 72,54 | BB |
| | JUMLAH | 1.698,58 | 1.369,83 | 879,76 | 534,99 | 1.031,64 | 5.518,76 | |
| | RATA-RATA | 22,95 | 18,51 | 11,89 | 7,23 | 13,94 | 74,58 | BB |

8. Pemeriksaan Monitoring

Badan Pengawasan dalam Tahun 2020, telah melakukan pemeriksaan monitoring pada 85 (delapan puluh lima) satker. Pemeriksaan Monitoring pada wilayah I berjumlah 25 satker, pada wilayah II berjumlah 27 satker, pada wilayah III berjumlah 20 satker, dan wilayah IV berjumlah 13 satker.

9. Pemeriksaan Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2020 telah melakukan Pemeriksaan Audit Kinerja yang berorientasi pada Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 57 (lima puluh tujuh) satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 32 Satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 24 Satker. Di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 0 Satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 1 satker.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Hasil Temuan Bidang Penyelesaian Perkara, meliputi :
 - a) Ketepatan Waktu Penyelesaian sejumlah 42 temuan
 - b) Ketaatan Penyampaian Panggilan sejumlah 48 temuan
 - c) Ketaatan Pengisian Penginputan sejumlah 39 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja tahun 2020 Bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan temuan terkait Ketepatan Waktu Penyelesaian mencapai sejumlah 42 temuan (32,55%) dari 129 (seratus dua puluh sembilan) temuan, Ketaatan Penyampaian Panggilan sejumlah 48 temuan (37,21%) dari 129 (seratus dua puluh sembilan) temuan, Ketaatan Pengisian Penginputan sejumlah 39 temuan (30,23%) dari 129 (seratus dua puluh sembilan) temuan.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait Ketaatan Penyampaian Panggilan lebih dominan yakni mencapai 48 (empat puluh delapan) temuan (37,21%) dari 129 (seratus dua puluh sembilan) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan Ketaatan Penyampaian Panggilan.

2) Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, meliputi :

- a) Kelengkapan Jumlah Panjar yang diterima sejumlah 6 temuan
- b) Kesesuaian Tarif temuan dan Biaya Perkara sejumlah 26 temuan
- c) Penggunaan Biaya Perkara sejumlah 32 temuan
- d) Pengembalian Sisa Panjar sejumlah 9 temuan
- e) Sisa Panjar yang Belum diambil para pihak sejumlah 11 temuan
- f) Saldo Keuangan Perkara sejumlah 26 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan temuan terkait Kelengkapan Jumlah Panjar yang diterima sejumlah 6 temuan (5,45%) dari 110 (seratus sepuluh) temuan, Kesesuaian Tarif temuan dan Biaya Perkara sejumlah 26 temuan (23,63%) dari 110 (seratus sepuluh) temuan, Penggunaan Biaya Perkara sejumlah 32 temuan (29,1%) dari 110 (seratus sepuluh) temuan, Pengembalian Sisa Panjar sejumlah 9 temuan (8,18%) dari 110 (seratus sepuluh) temuan, Sisa Panjar yang Belum diambil para pihak sejumlah 11 temuan (10%) dari 110 (seratus sepuluh) temuan, Saldo Keuangan Perkara sejumlah 26 temuan (23,63%) dari 110 (seratus sepuluh) temuan.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait penggunaan biaya perkara lebih dominan yakni mencapai 32 (tiga puluh dua) temuan (29,09%) dari 110 (seratus sepuluh) temuan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya penggunaan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

3) Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan, meliputi :

- a) Ketersediaan Sarana dan Prasarana sejumlah 37 temuan
- b) Pelaksanaan Survei IKM sejumlah 20 temuan

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan sejumlah 37 temuan (64,91%) dari 57 (lima puluh tujuh) temuan, Pelaksanaan Survei IKM sejumlah 20 temuan (35,08%) dari 57 (lima puluh tujuh) temuan.

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja Bidang Sarana dan Prasarana menggambarkan bahwa temuan terkait Ketersediaan Sarana dan Prasarana lebih dominan yakni mencapai 37 (tiga puluh tujuh) temuan (64,91%) dari 57 (lima puluh tujuh) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta melakukan Survei IKM secara periodik per semester.

10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2020 yang terdiri dari 569 temuan dengan 1.220 rekomendasi sebesar Rp 35.922.673.759,06 dengan status sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.083 rekomendasi sebesar Rp 29.796.510.494,85.
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 122 rekomendasi sebesar Rp 5.602.934.444,58.
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp 523.228.819,63.

11. Penguatan Sistem Pengawasan

A. Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan

Pada tahun 2020 penguatan sistem pengawasan dilakukan Consulting dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 12 sd. 14 Februari 2020. Maksud dan Tujuan kegiatan Consulting tersebut :

- 1) Memberikan pemahaman teori dan praktek pengadaan belanja modal gedung dan bangunan dari sisi kebijakan, resiko dan aspek pengendalian yang wajib dipersiapkan peserta dari satuan kerja.

- 2) Memberikan sarana knowledge managemen yang berkelanjutan, mengurangi hal tak terduga yang kurang menyenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui penerapan manajemen risiko.
- 3) Menginisiasi keberanian dari masing-masing satuan kerja untuk memulai transparan, akuntabel dan berintegitas sejak awal proses pengadaan untuk menghindari resiko pengadaan gagal selesai pada tahun anggaran berjalan maupun resiko tindak pidana.

Peserta kegiatan consulting terdiri dari Ketua Pengadilan, Pejabat Pembuat Komitmen dari Pengadilan Baru yang memiliki proyek belanja modal gedung dan bangunan.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan;

Badan Pengawasan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Pengawasan;
2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV.

1) Sekretariat Badan Pengawasan;

Sekretariat Badan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

2) Inspektorat Wilayah I;

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah I yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

3) Inspektorat Wilayah II;

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah II yang meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;

- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

4) Inspektorat Wilayah III;

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah III yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

5) Inspektorat Wilayah IV.

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah IV yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;

- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, finansial peradilan dan perilaku aparaturnya pengadilan, sedangkan sasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2020 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Fungsi

C. Sistematika Penyajian

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahun 2020

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

IV. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”, dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Perencanaan Keuangan.

1. Visi dan Misi

Visi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah ”Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa”.

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya kedalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding di bidang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

| SASARAN | INDIKATOR | PROGRAM | KEGIATAN |
|--|--|---|--|
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan efektif dan efisien. | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI | 1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | | |
| | Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan | | |
| | Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu | | |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti | | |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | | |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | | |
| Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel | Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | | 1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja | | |
| | Pelaksanaan Zona Integritas | | |
| | Probitas Audit PBJ | | |
| | Consulting Probitas Audit | | |
| | Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana | | |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | | |

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengawasan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan

| KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|---|---|---|------------------------|--|
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti; | Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk ditambah dengan jumlah sisa pengaduan tahun lalu (x 100%); | Badan Pengawasan | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu; | Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan (x 100%); | Badan Pengawasan | Laporan Triwulan website dari Ortala |
| | Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan; | Jumlah hukuman disiplin yang dipublikasi dibagi dengan jumlah hukuman disiplin (x 100%); | Badan Pengawasan | Laporan Bulanan website dari Ortala |
| | Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu. | Jumlah hasil pemeriksaan kasus tepat waktu dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan kasus (x 100%); | Badan Pengawasan | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti; | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%); | Badan Pengawasan | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV |
| | Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti; | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%); | Badan Pengawasan | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV |
| | Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu. | Jumlah laporan hasil pengawasan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan hasil pengawasan (x 100%) | Badan Pengawasan | Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV |

C. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2020 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2020 Badan Pengawasan menetapkan komitmen kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Badan Pengawasan MA RI Tahun 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
|--|--|----------------|---|---|--|--------|------------------|
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI | 1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah | 001 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | - |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | 75% | | | | 75% | - |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | 100% | | | | 100% | - |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 100% | | | | 100% | Rp 5.408.047.000 |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | 80% | | | 001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV | 80% | - |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | 80% | | | | 80% | Rp 115.500.000 |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | 100% | | | | 100% | - |
| Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel | Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | 100% (55 LHP) | | | | 100% | Rp 2.440.794.000 |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | 100% (61 LHP) | | | | 100% | Rp 2.437.834.000 |
| | Pelaksanaan Zona Integritas | 100% (116 LHP) | | | | 100% | Rp 2.760.573.000 |
| | Probitas Audit PBJ | 100% (23 LHP) | | | | 100% | Rp 784.556.423 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---------------------|------|----------------|
| | Consulting Probit Audit | 100% (1 Kegiatan) | | 1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung | | 100% | Rp 405.200.000 |
| | Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana | 100% (1 LHP) | | | 004 Pelaksanaan MKH | 100% | Rp 23.000.000 |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | 100% (74 LHE) | | | | 100% | - |

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020, maka dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengawasan dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan dan Inspektur Wilayah I sampai dengan IV Badan Pengawasan dengan Kepala Badan Pengawasan.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2020.

1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan

Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | |
|---|--|--------|--|------------------|------------------|
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan | - | |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | 75% | | - | |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | 100% | | - | |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 100% | | Rp 5.408.047.000 | |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | 80% | | - | |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | 80% | | Rp 115.500.000 | |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | 100% | | - | |
| Terselenggaranya manajemen peradilan dan | Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | 55 LHP | | | Rp 2.440.794.000 |

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------------|
| administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel | Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas | 61 LHP | | Rp 2.437.834.000 |
| | Pelaksanaan Zona Integritas | 116 LHP | | Rp 2.760.573.000 |
| | Probit Audit PBJ | 23 LHP | | Rp 784.556.423 |
| | Consulting Probit Audit | 1 Kegiatan | Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya | Rp 405.200.000 |
| | Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana | 1 LHP | | Rp 23.000.000 |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | 74 LHE | | - |

Jumlah Anggaran : **Rp 14.375.504.423,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan

Tabel 2.4.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|---|------------|--|------------------|
| Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel | Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan | 13 LHP | Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya | Rp 115.500.000 |
| | Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana | 1 LHP | | Rp 23.000.000 |
| | Consulting Probit Audit | 1 Kegiatan | | Rp 405.200.000 |
| | Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas | 111 LHP | Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan | Rp 2.760.573.000 |

Jumlah Anggaran : **Rp 3.304.273.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

3. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

Tabel 2.4.3 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|--|--------|--|------------------|
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan | - |
| | Persentase Penanganan Pengaduan tepat waktu | 75% | | - |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | 100% | | - |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 100% | | Rp 1.357.923.000 |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | 80% | | - |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | 80% | | - |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | 100% | | - |
| Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum | Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | 15 LHP | | Rp 572.159.000 |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | 15 LHP | | Rp 793.327.000 |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | 20 LHE | | - |
| | Probit Audit PBJ | 11 LHP | | Rp 324.169.318 |
| | Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas | 30 LHP | | Rp 677.323.000 |

Jumlah Anggaran : **Rp 3.724.901.318,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.

4. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

Tabel 2.4.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | |
|---|--|------------|--|------------------|----------------|
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan | - | |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | 75% | | - | |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | 100% | | - | |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 100% | | Rp 1.776.786.000 | |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | 80% | | - | |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | 80% | | - | |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | 100% | | - | |
| Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum | Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | 15 LHP | | - | Rp 432.632.000 |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | 17 LHP | | - | Rp 499.388.000 |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | 25 LHE | | - | - |
| | Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas | 34 LHP | - | Rp 713.207.000 | |
| | Probity Audit PBJ | 1 LHP | - | Rp 22.860.000 | |
| | Consulting Probity Audit | 1 Kegiatan | Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya | Rp 405.200.000 | |

Jumlah Anggaran : **Rp 3.850.073.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.

5. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

Tabel 2.4.5 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|--|--------|--|------------------|
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan | - |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | 75% | | - |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | 100% | | - |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 100% | | Rp 1.255.562.000 |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | 80% | | - |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | 80% | | - |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | 100% | | - |
| Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum | Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | 15 LHP | | Rp 837.730.000 |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | 16 LHP | | Rp 641.614.000 |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | 20 LHE | | - |
| | Probity Audit PBJ | 11 LHP | Rp 437.527.105 | |
| | Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas | 35 LHP | Rp 913.675.000 | |

Jumlah Anggaran : **Rp 4.086.108.105,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.

6. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan

Tabel 2.4.6 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|--|--------|--|------------------|
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan | - |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | 75% | | - |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | 100% | | - |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 100% | | Rp 1.017.776.000 |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | 80% | | - |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | 80% | | - |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | 100% | | - |
| Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen manajemen peradilan dan administrasi umum | Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | 10 LHP | | Rp 598.273.000 |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | 13 LHP | | Rp 503.505.000 |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | 10 LHE | | - |
| | Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas | 17 LHP | Rp 456.368.000 | |

Jumlah Anggaran : **Rp 2.575.922.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

Perbandingan capaian kegiatan Badan Pengawasan tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.2 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2019

| Pemeriksaan / Kegiatan | Wilayah | | | | Jumlah Capaian | Target | Persentase |
|---|---------|----|-----|----|----------------|--------|-------------|
| | I | II | III | IV | | | |
| Kasus | 54 | 85 | 40 | 26 | 205 | 175 | 117% |
| Reguler | 15 | 14 | 19 | 10 | 58 | 54 | 107% |
| Pemeriksaan Kinerja / Zona Integritas | 26 | 35 | 25 | 11 | 97 | 83 | 117% |
| Monitoring | 30 | 31 | 13 | 22 | 96 | 57 | 168% |
| Pemeriksaan Keuangan | 4 | 13 | 2 | 2 | 21 | 10 | 210% |
| Reviu LK | - | 6 | - | - | 6 | 2 | 300% |
| Reviu / Verifikasi pernyataan telah di reviu | - | 8 | - | - | 8 | 2 | 400% |
| Reviu Hibah | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 250% |
| Reviu Pengelolaan Anggaran | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 100% |
| Reviu Perencanaan Anggaran | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 100% |
| Reviu PNBK | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 100% |
| Reviu PIPK | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 100% |
| Evaluasi LKjIP | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 114% |
| Audit Manajemen Kepegawaian | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
| Audit PBJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
| SIDAK | 26 | | | | 37 | 40 | 92% |
| Mysteri Shopper | 11 | | | | | | |
| TLHP BPK | 21 | | | | | 10 | 210% |
| LO Pendampingan | 17 | | | | | 4 | 425% |
| TOTAL | | | | | | | 173% |

Capaian kinerja Badan Pengawasan selama tahun 2019 melebihi target yang direncanakan dari target 100% yaitu 173%.

Tabel 2.5.1 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2020

| Pemeriksaan / Kegiatan | Wilayah | | | | Jumlah Capaian | Target | Persentase |
|---|---------|----|-----|----|----------------|------------|-------------|
| | I | II | III | IV | | | |
| Pemeriksaan Kasus | 37 | 74 | 30 | 14 | 155 | 175 LHP | 88,57% |
| Pemeriksaan Reguler | 14 | 11 | 16 | 11 | 52 | 55 LHP | 94,54% |
| Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas | 30 | 31 | 35 | 17 | 113 | 116 LHP | 97,41% |
| Pemeriksaan Monitoring | 25 | 27 | 20 | 13 | 85 | 88 LHP | 96,59% |
| Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | 16 | 17 | 15 | 9 | 57 | 61 LHP | 93,44% |
| Pemeriksaan Kepegawaian | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 LHP | 275% |
| Coonsulting Probity Audit | - | 1 | - | - | 1 | 1 LHP | 100% |
| Probity Audit PBJ | 11 | 1 | 11 | - | 23 | 23 LHP | 100% |
| Pemeriksaan Lintas Provinsi / Tujuan Tertentu / Cek Fisik / Saber Pungli / Investigasi / Unit Intelijen / SIDAK | 12 | | | | 12 | 12 LHP | 100% |
| TLHP BPK | 13 | | | | 13 | 13 LHP | 100% |
| LO Pendampingan | 9 | | | | 9 | 1 LHP | 900% |
| IACM | 1 | | | | 1 | 1 Kegiatan | 100% |
| Reviu PIPK | 1 | | | | 1 | 1 Kegiatan | 100% |
| TOTAL | | | | | | | 173% |

Capaian kinerja Badan Pengawasan selama tahun 2020 melebihi target yang direncanakan dari target 100% yaitu 173%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|--|--|-------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% (3.569 pengaduan) | 100% |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | 75% | 45% (2.137 LHP) | 60% |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | 100% 162 orang | 100% (162 Orang) | 100% |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 100% (175 LHP) | 44% (77 LHP) | 44% |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | 80% | 66% (1.839 rekomendasi) | 83% |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | 80% | 79% (1.083 rekomendasi) | 99% |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | 100% 52 LHP | 100% (52 LHP) | 100% |
| Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel | Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | 55 LHP | 52 LHP | 94% |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | 61 LHP | 57 LHP | 93% |
| | Pelaksanaan Zona Integritas | 116 LHP | 113 LHP | 97% |
| | Probity Audit PBJ | 23 LHP | 23 LHP | 100% |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------|
| | Consulting Probity Audit | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100% |
| | Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana | 1 LHP | 1 LHP | 100% |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | 74 LHE | 74 LHE | 100% |

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan dalam melaksanakan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kerjanya, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, efektif dan efisien

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti. | 100% (2.952 pengaduan) | 100% (2.952 pengaduan) | 100% | 100% (3.569 pengaduan) | 100% (3.569 pengaduan) | 100% |

Pada Tahun 2020 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.569 pengaduan dengan capaian kinerja 100%, tindaklanjut atas surat tersebut diperinci sebagai berikut: Pengaduan masih proses penyelesaian 1.432 Pengaduan dan Pengaduan yang selesai diproses 2.137 pengaduan yaitu diperiksa Tim Bawas 131 pengaduan, delegasi ke Tingkat Banding 1 pengaduan, Konfirmasi 62 pengaduan, Klarifikasi 685 pengaduan, Memorandum / Delegasi Internal 20 pengaduan, dijawab Surat 853 pengaduan, diarsipkan 17 pengaduan, Gabung Berkas 349 pengaduan, dicabut 19 pengaduan.

Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2020 - 2024 secara umum Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIWAS yang memberikan kemudahan masyarakat dalam penyampaian pengaduan dimanapun, sehingga kinerja dari Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas, dengan demikian kinerja Badan Pengawasan sudah **berupa outcome**.

Indikator kinerja ke-2 : Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--------|-----------|---------|--------|--------------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu | N/A | N/A | N/A | 75% | 45% (2.137 pengaduan) | 60% |

Pada Tahun 2020 Badan Pengawasan dalam penanganan pengaduan telah selesai diproses sejumlah 2.137 surat pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Tindaklanjut | Jumlah |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 1 | Diperiksa Tim Bawas | 131 |
| 2 | Delegasi ke Tingkat Banding | 1 |
| 3 | Konfirmasi | 62 |
| 4 | Klarifikasi | 685 |
| 5 | Memorandum / Delegasi Internal | 20 |
| 6 | Dijawab Surat | 853 |
| 7 | Diarsipkan | 17 |
| 8 | Gabung berkas | 349 |
| 9 | Dicabut | 19 |
| Jumlah | | 2.137 |

Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti tersebut terdapat 2.137 pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu dari jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan yaitu sejumlah 3.569 pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 sehingga capaian kinerja mencapai 60%.

Indikator kinerja ke-3 : Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan)

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | 100% (179 orang) | 100% (179 orang) | 100% | 100% (162 orang) | 100% (162 orang) | 100% |

Pada tahun 2020 aparat peradilan yang dikenakan sanksi berasal dari pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu sejumlah 162 orang , dengan rincian hukuman disiplin berat 31 orang, hukuman disiplin sedang 27 orang, hukuman disiplin ringan 104 orang. Dari jumlah tersebut persentase terbesar aparat yang dijatuhi hukuman disiplin adalah hakim / hakim ad hoc sejumlah 97 orang (59,87%).

Jika dibandingkan dengan jumlah hukuman disiplin tahun 2019 terdapat penurunan sebanyak 17 orang, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dari pimpinan Mahkamah Agung RI yang bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan membasmi segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik. Disamping itu didukung oleh semakin efektifnya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan kepada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tabel 3.2 Hukuman Disiplin Tahun 2020

| No | Jabatan | Jenis Hukuman Disiplin | | | Jumlah |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|------------|
| | | Berat | Sedang | Ringan | |
| 1 | Hakim | 9 | 20 | 61 | 90 |
| | Hakim Ad Hoc | - | - | 7 | 7 |
| 2 | Panitera | 3 | 1 | - | 4 |
| 3 | Sekretaris | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Panitera Muda | 2 | - | 4 | 6 |
| 5 | Panitera Pengganti | 3 | 2 | 15 | 20 |
| 6 | Jurusita | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | Jurusita Pengganti | - | - | 5 | 5 |
| 8 | Pejabat Struktural | - | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Staf | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 10 | PPNPN | 2 | - | - | 2 |
| Jumlah | | 31 | 27 | 104 | 162 |

Indikator kinerja ke-4 : Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 100% (175 LHP) | 117% (205 LHP) | 117% | 100% (175 LHP) | 44% (77 LHP) | 44% |

Pada Tahun 2020 Badan Pengawasan telah menindaklanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tepat waktu sejumlah 77 LHP dengan capaian kinerja 44%.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dari hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tersebut yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah menandakan kinerja dari Badan Pengawasan setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2020 realisasi dari pengaduan yang ditindaklanjuti

(LHP tepat waktu) belum melampaui dari target yang telah ditetapkan, yaitu dengan capaian 44%.

SASARAN 2 : Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif.

Indikator kinerja ke-1 : Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--------|----------------------------|---------|--------|----------------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | 80% | 70% (2.812 rekomendasi) | 88% | 80% | 66% (1.839 rekomendasi) | 83% |

Pada Tahun 2020 Badan Pengawasan telah merekomendasikan hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti yaitu Pemeriksaan Monitoring yang berupa tindaklanjut atas pelaksanaan Pemeriksaan Reguler sejumlah 85 Satker dengan rekomendasi pada Wilayah I sejumlah 706 dan sudah ditindaklanjuti sejumlah 597, rekomendasi pada Wilayah II sejumlah 725 dan sudah ditindaklanjuti sejumlah 561, rekomendasi pada Wilayah III sejumlah 453 dan sudah ditindaklanjuti sejumlah 418, rekomendasi pada Wilayah IV sejumlah 345 dan sudah ditindaklanjuti sejumlah 263 rekomendasi, untuk jumlah keseluruhan rekomendasi Wilayah I, II, III, IV sejumlah 2.229 dan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti keseluruhan Wilayah I, II, III, IV sejumlah 1.839 rekomendasi dengan capaian kinerja 83% yaitu sebagai tindaklanjut dari temuan atas Pemeriksaan Reguler.

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan monitoring pada 85 Satuan Kerja (Satker) sebagai berikut :

Tabel Data Pemeriksaan Monitoring Tahun 2020

| Lingkungan Peradilan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | Wilayah IV | Jumlah |
|----------------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| Peradilan Umum | 13 | 14 | 13 | 8 | 48 |
| Peradilan Agama | 10 | 9 | 3 | 3 | 25 |
| Peradilan Militer | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Peradilan TUN | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| <i>Total</i> | 25 | 27 | 20 | 13 | 85 |

Tabel Data Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan Monitoring Tahun 2020

| No | Bidang | Jumlah Rekomendasi | Keterangan |
|----|--------------------------|--------------------|---|
| 1 | Manajemen Peradilan | 181 | Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan |
| 2 | Administrasi Perkara | 479 | Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll. |
| 3 | Administrasi Persidangan | 390 | Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dll |

| | | | |
|---|--------------------------|-----|--|
| 4 | Administrasi Umum | 939 | Kedisiplinan, Laporan Kinerja, Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, dll. |
| 5 | Kinerja Pelayanan Publik | 240 | Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum). |

Indikator kinerja ke-2 : Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--------|-----------|---------|--------|----------------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | N/A | N/A | N/A | 80% | 79% (1.083 rekomendasi) | 99% |

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2020 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester II Tahun 2020 yang terdiri dari 569 temuan dengan 1.220 rekomendasi sebesar Rp 35.922.673.759,06 dengan status sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.083 rekomendasi sebesar Rp 29.796.510.494,85.
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 122 rekomendasi sebesar Rp 5.602.934.444,58.
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp 523.228.819,63.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 1.083 rekomendasi sedangkan yang belum sesuai dan

belum ditindaklanjuti sebanyak 126 rekomendasi sehingga dari jumlah 1.220 rekomendasi memperoleh capaian 99%.

Indikator kinerja ke-3 : Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | N/A | N/A | N/A | 100% (52 LHP) | 100% (52 LHP) | 100% |

Pada Tahun 2020 Badan Pengawasan telah melakukan Pengawasan yaitu berupa Pengawasan Reguler sejumlah 52 Satuan Kerja (Satker) dengan capaian kinerja 100%,

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja, yaitu pada peradilan umum sejumlah 25 Satker, peradlan agama sejumlah 25 Satker, peradlan militer sejumlah 1 Satker, peradlan TUN sejumlah 1 Satker.

SASARAN 3 : Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel

Indikator kinerja ke-1 : Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---------------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan pengawasan reguler | 100% (54 Satker) | 107% (58 Satker) | 107% | 100% (55 LHP) | 94% (52 LHP) | 94% |

Pada Tahun 2020 Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan reguler terhadap 52 Satker, dimana dalam pelaksanaan pengawasan reguler tersebut belum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 55 satker dengan capaian kinerja 94%.

Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Reguler tersebut yaitu pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 25 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 25 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 1 satker.

Indikator kinerja ke-2 : Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas.

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---------------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Jumlah pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas | 100% (83 Satker) | 117% (97 Satker) | 117% | 100% (61 LHP) | 93% (57 LHP) | 93% |

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2020 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas sejumlah 57 Satuan Kerja (Satker), belum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 61 satker dengan capaian kinerja 93%.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 57 (lima puluh tujuh) Satker dengan tujuan untuk mengukur Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para pencari keadilan.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 32 Satker, di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 24 Satker, di Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 0 Satker dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 1 satker.

Indikator kinerja ke-3 : Jumlah Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--------|-----------|---------|----------------------|---------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Jumlah Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas | N/A | N/A | N/A | 100% (116 Satker) | 97% (113 Satker) | 97% |

Pada Tahun 2020 Badan Pengawasan telah melakukan pelaksanaan penilaian Zona Integritas terhadap 113 Satker, belum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 116 satker dengan capaian kinerja 97%.

Adapun perincian dari pelaksanaan penilaian Zona Integritas pada wilayah I berjumlah 30 satker, pada wilayah II berjumlah 31 satker, pada wilayah III berjumlah 35 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 17 satker.

Indikator kinerja ke-4 : Jumlah Pemeriksaan Probity Audit PBJ

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------|---------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Jumlah Pemeriksaan Probity Audit PBJ | N/A | N/A | N/A | 100% (23 Satker) | 100% (23 Satker) | 100% |

Pada tahun 2020 Badan Pengawasan telah melakukan Pemeriksaan Probity Audit PBJ pada 23 satker dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 23 satker, dengan capaian kinerja 100%.

Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Probity Audit PBJ pada wilayah I berjumlah 11 satker, pada wilayah II berjumlah 1 satker, pada wilayah III berjumlah 11 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 0 satker.

Indikator kinerja ke-5: Consulting Probity Audit

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--------------------------|--------|-----------|---------|----------------------|----------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Consulting Probity Audit | N/A | N/A | N/A | 100% (1 Kegiatan) | 100% (1 Kegiatan) | 100% |

Pada tahun 2020 penguatan sistem pengawasan dilakukan *Consulting* dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 12 sd. 14 Februari 2020. Maksud dan Tujuan kegiatan *Consulting* tersebut :

- 1) Memberikan pemahaman teori dan praktek pengadaan belanja modal gedung dan bangunan dari sisi kebijakan, resiko dan aspek pengendalian yang wajib dipersiapkan peserta dari satuan kerja.
- 2) Memberikan sarana knowledge managemen yang berkelanjutan, mengurangi hal tak terduga yang kurang menyenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui penerapan manajemen risiko.
- 3) Menginisiasi keberanian dari masing-masing satuan kerja untuk memulai transparan, akuntabel dan berintegritas sejak awal proses pengadaan untuk menghindari resiko pengadaan gagal selesai pada tahun anggaran berjalan maupun resiko tindak pidana.

Kegiatan Consulting Probity Audit dilaksanakan dengan peserta berjumlah 30 orang, yang terdiri dari Ketua Pengadilan, Pejabat Pembuat Komitmen dari Pengadilan Baru yang memiliki proyek belanja modal gedung dan bangunan.

Indikator kinerja ke-6 : Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terlaksana

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Jumlah sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana | 100% (10 LHP) | 20% (2 LHP) | 20% | 100% (1 LHP) | 100% (1 LHP) | 100% |

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim, Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tahun 2020 Badan Pengawasan merencanakan untuk melakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim yaitu 1 kegiatan MKH namun target dan realisasi hanya 1 kegiatan MKH atau 1 LHP. Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 1 (satu) orang Hakim atas nama I S., S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pct (dahulu Wakil Ketua Pengadilan Agama TI) dengan penjatuhan hukuman Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi Agama Mks.

Indikator kinerja ke-7 : Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|---------|
| | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | 100% (74 LHE) | 100% (74 LHE) | 100% | 100% (74 LHE) | 100% (74 LHE) | 100% |

Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2019 (Pelaksanaan Tahun 2020) terhadap 9 satker (12,16%) memperoleh nilai A, 57 Satker (77,02%) memperoleh nilai BB, 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C.

Capaian nilai SAKIP tahun 2019 (pelaksanaan tahun 2020) terhadap 74 satuan kerja Eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 9 Satker (12,16%), dan BB (sangat baik) 57 Satker (77,02%) namun untuk kategori B (baik) terdapat penurunan dari 14 Satker (18,91%) menjadi 7 Satker (9,45%) dan untuk tahun 2018 (pelaksanaan tahun 2019) yang masuk kategori CC (sangat cukup) 1 Satker (1,35%) dan untuk tahun 2019 (pelaksanaan

tahun 2020) untuk kategori C (cukup) 1 Satker (1,35%). Hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

Dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 31.972.836.000 telah direalisasi sebesar Rp 29.319.660.823 atau 91,70%. Rincian realisasi anggaran kegiatan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.1 Realisasi anggaran kegiatan Badan Pengawasan MA RI

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | CAPAIAN % |
|--|--|------------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | - | - | - |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | - | - | - |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | - | - | - |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | Rp 5.408.047.000 | Rp 4.893.894.089 | 90,49% |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | - | - | - |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | Rp 115.500.000 | Rp 115.373.600 | 99,89% |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | - | - | - |
| Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel | Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | Rp 2.440.794.000 | Rp 2.250.063.482 | 92,18% |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | Rp 2.437.834.000 | Rp 2.030.971.413 | 83,31% |
| | Pelaksanaan Zona Integritas | Rp 2.760.573.000 | Rp 2.578.623.264 | 93,40% |
| | Probit Audit PBJ | Rp 784.556.423 | Rp 784.556.423 | 100% |
| | Consulting Probit Audit | Rp 405.200.000 | Rp 405.199.622 | 99,99% |
| | Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana | Rp 23.000.000 | Rp 4.187.100 | 18,20% |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | - | - | - |

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 87%, maka realisasi anggaran sebesar 48,39% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.2 Efisiensi Anggaran Kegiatan Badan Pengawasan MA RI

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | % REALISASI ANGGARAN | % REALISASI KINERJA | % EFISIENSI |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | - | 100% | 100% |
| | Persentase penanganan pengaduan tepat waktu | - | 45% | 45% |
| | Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan | - | 100% | 100% |
| | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu | 90,49% | 44% | -46,49% |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti | - | 66% | 66% |
| | Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti | 99,89% | 79% | -20,89% |
| | Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu | - | 100% | 100% |
| Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel | Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler | 92,18% | 94% | 1,82% |
| | Jumlah Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas | 83,31% | 93% | 9,69% |
| | Pelaksanaan Zona Integritas | 93,40% | 97% | 3,6% |
| | Probity Audit PBJ | 100% | 100% | 0% |
| | Consulting Probity Audit | 99,99% | 100% | 0,01% |
| | Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana | 18,20% | 100% | 81,8% |
| | Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan | - | 100% | 100% |
| JUMLAH | | 677,46% | 1.218% | 540,54% |
| RATA-RATA | | 48,39% | 87% | 38,61% |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra tahun 2020 - 2024. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Secara umum capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2020 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya.

Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan mencapai target-target tersebut, dalam penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel karena adanya kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi, dimana serapan anggarannya mencapai 91,70%, dengan demikian kinerja Badan Pengawasan tahun 2020 dapat disimpulkan baik.

B. Saran

Hasil yang telah diperoleh agar dapat dipertahankan dan bahkan untuk lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.